

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR
KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Oleh:

MIA FEBRIZA RAMADHANTI**11575204392**

**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR
KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

MIA FEBRIZA RAMADHANTI

11575204392



**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mia Febriza Ramadhanti
NIM : 11575204392
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG
TALUK HILIR KECAMATAN KUANTAN TENGAH

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING


Drs. H. Almasri, M. Si
NIP.19670801 200501 1 007

MENGETAHUI:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Program Studi,
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin S. Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mia Febriza Ramadhanti
NIM : 11575204392
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK
HILIR KECAMATAN KUANTAN TENGAH
Tanggal ujian : 27 September 2019

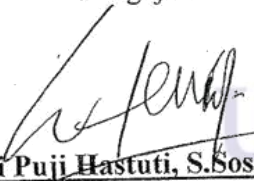
DISETUJUI OLEH:

KETUA PENGUJI


Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

MENGETAHUI:

Penguji I


Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
NIP. 19810505 200604 2 006

Penguji II


Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
NIK. 130 717 057

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR KECAMATAN KUANTAN TENGAH

Oleh:

Mia Febriza Ramadhanti

Penelitian ini dilakukan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah serta apa saja hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan indikator penelitian kesejahteraan sosial, sarana dan infrastruktur, lingkungan sosial, lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, dokumentasi dan observasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 95 orang. Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah dengan teknik analisa diskriptif kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan jenis data yang akan dianalisis. Indikator penelitian penulis menggunakan teori Rogers tentang dampak sosial dan ekonomi dalam pembangunan. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah memberikan dampak sosial ekonomi dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari persentase rata-rata kualitatif yang berada pada skala 69,49%. Akan tetapi ada beberapa hambatan dalam pembangunan infratraktur Desa Seberang Taluk Hilir ini yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan skill masyarakat, keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pemerintah desa, serta kendala pembebasan lahan.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tanpa batas penulis persembahkan kehadirat-Nya yang telah memberikan nikmat iman, ikhsan dan Islam. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan figure sentral umat Islam. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR KECAMATAN KUANTAN TENGAH” ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang di ajukan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN SUSKA Riau. Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati dan sepehny jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda Gusmedi dan Ibunda Kotdija yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil selama ananda menempuh pendidikan, jasa ayahanda dan ibunda tidak akan pernah terlupakan.
2. Serta untuk Alm nenek, kakek, saudara Afdhal Fikrah dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan memberikan keceriaan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektor lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara.
6. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.sos, MKP selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
7. Bapak Drs. H. Almasri, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai selesainya skripsi ini.
8. Bapak Mashuri, MA selaku penasehat akademik yang sudah memberikan motivasi yang bermanfaat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
9. Bapak/Ibuk dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.
10. Bapak Solahudin, S.E selaku Kepala Desa Seberang Taluk Hilir dan seluruh perangkat desa yang telah membantu dan memberi masukan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
11. Sahabat seperjuangan Ana D 15 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman KKN Pematang angkatan tahun 2018 yang telah menemani dan mengajarkan arti kekeluargaan pada masa KKN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pendukung dan penyemangat penulis ucapkan terimakasih banyak semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda.

Pekanbaru, September 2019
Penulis

Mia Febriza Ramadhanti
NIM: 11575204392



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	XII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Pembangunan	13
2.1.1 Perencanaan Pembangunan Desa	15
2.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa	18
2.1.3 Pengawasan Pembangunan Desa	18
2.1.4 Infrastruktur Desa	18
2.2 Konsep Otonomi Desa	21
2.2.1 Pemerintahan Desa	24
2.2.2 Sumber Dana Pembangunan Desa	28
2.3 Dampak Sosial	34
2.4 Dampak Ekonomi	38
2.5 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan	41
2.6 Penelitian Terdahulu	41
2.7 Definisi Konsep	44
2.8 Konsep Operasional	44
2.9 Kerangka Berpikir	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	47
3.2 Jenis Penelitian.....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Subjek Penelitian.....	48
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Seberang Taluk Hilir.....	55
4.2 Kondisi Umum Desa.....	56
4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD).....	56
4.4 Demografi Desa.....	58
4.5 Kondisi Penduduk.....	58
4.6 Pendidikan.....	59
4.7 Kesehatan.....	60
4.8 Keagamaan.....	61
4.9 Mata Pencaharian Masyarakat.....	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.....	63
5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
5.1.2 Responden Berdasarkan Umur.....	64
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	64
5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	65
5.2 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Seberang Taluk Hilir.....	66
5.2.1 Perencanaan Pembangunan Desa.....	67
5.2.2 Menganalisa Pembangunan Desa.....	68
5.2.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3 Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Seberang Taluk Hilir	73
5.3.1 Aspek Sosial.....	74
5.3.2 Aspek Ekonomi.....	82
5.3.3 Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden	87
5.4 Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Seberang Taluk Hilir	89
5.4.1 Aspek Sosial.....	89
5.4.2 Aspek Ekonomi.....	90

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	96
6.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat 2018	4
Tabel 1.2 :	Struktur Mata Pencarian 2019.....	4
Tabel 1.3 :	Daftar Masalah dari Sketsa Desa Tahun 2018.....	5
Tabel 1.4:	Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018.....	6
Tabel 1.5:	Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Tahun 2018 .	8
Tabel 3.1 :	Informan Penelitian.....	50
Tabel 4.1:	Batas Desa Seberang Taluk Hilir	58
Tabel 4.2 :	Luas Wilayah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017	58
Tabel 4.3 :	Jumlah Penduduk Desa Seberang Taluk Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	59
Tabel 4.4 :	Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Tahun 2017.....	59
Tabel 4.5 :	Jumlah Tingkat Kematian Bayi Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017	60
Tabel 4.6 :	Jumlah Tingkat Kematian Ibu Melahirkan Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017	60
Tabel 4.7 :	Jumlah Cakupan Imunisasi Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017	60
Tabel 4.8 :	Jumlah Pemenuhan Air Bersih Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017	61
Tabel 4.9 :	Data Keagamaan Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2015	61
Tabel 4.10 :	Struktur Mata Pencariaan Masyarakat Tahun 2018.....	62
Tabel 5.1 :	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 5.2 :	Jumlah Responden Berdasarkan Umur.....	64
Tabel 5.3 :	Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan	64
Tabel 5.4 :	Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan	65
Tabel 5.5 :	Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2018	71
Tabel 5.6:	Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang Dampak Kesejahteraan Sosial Pembangunan Infrastruktur	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

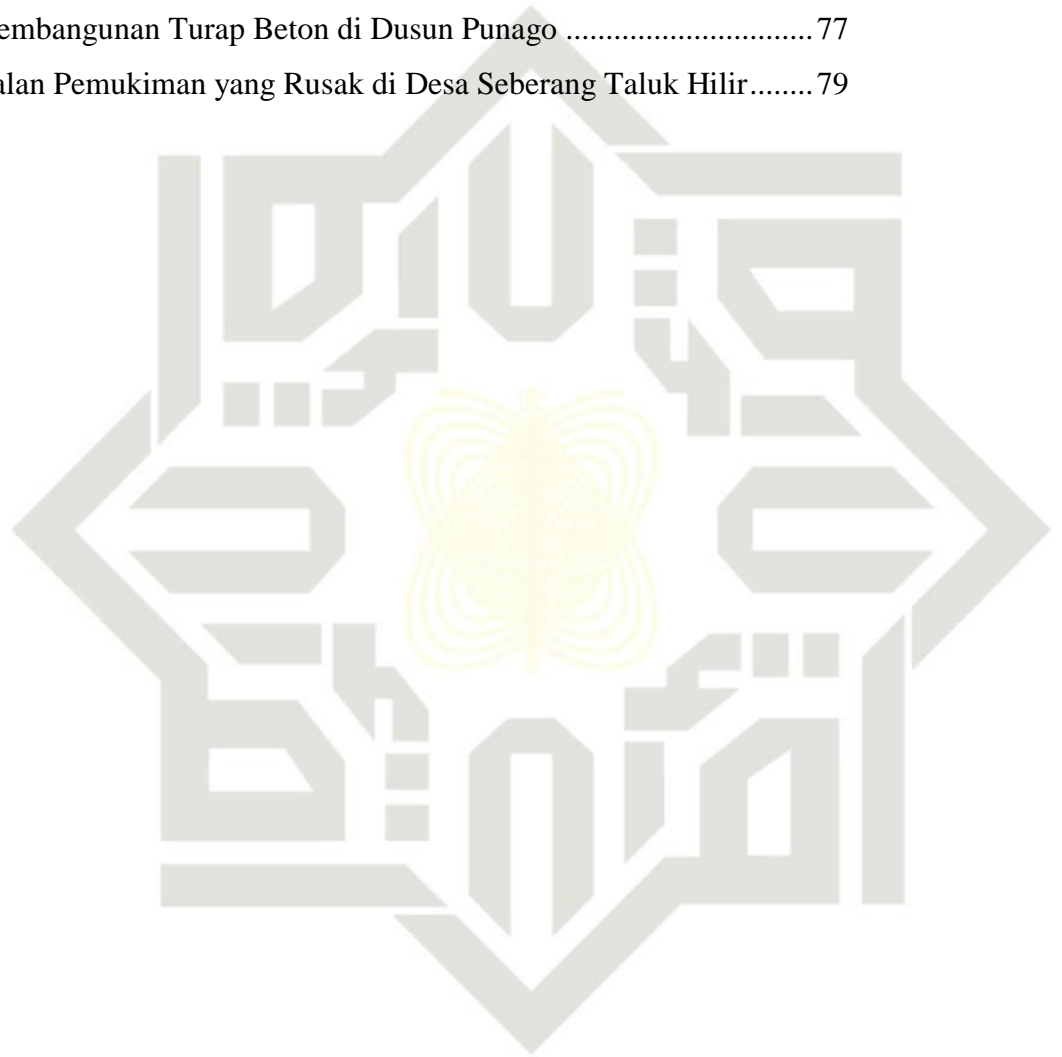
Desa	75
Tabel 5.7: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Serta Sarana Kesehatan dan Alat Pertanian Oleh Pemerintah Desa ..	78
Tabel 5.8: Tanggapan Masyarakat Dsa Seberang Taluk Hilir Tentang Dampak Lingkungan Sosial Atas Pembangunan Infrastruktur Desa	80
Tabel 5.9: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang Dampak Lapangan Pekerjaan Atas Pembangunan Infrastruktur Desa	82
Tabel 5.10: Struktur Mata Pencarian Masyarakat 2017	84
Tabel 5.11: Struktur Mata Pencarian Masyarakat 2018	85
Tabel 5.12: Tanggapan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Tentang Dampak Peningkatan Pendapatan Atas Pembangunan Infrastruktur Desa	85
Tabel 5.13: Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden.....	87
Tabel 5.14: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2016	91
Tabel 5.15: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017	92
Tabel 5.16: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2018	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ..	57
Gambar 5.1: Musyawarah Penyusunan RPJM Desa di Kantor Desa.....	68
Gambar 5.2: Pemasangan Papan Informasi Penggunaan APBDES.....	73
Gambar 5.3: Pembangunan Turap Beton di Dusun Punago	77
Gambar 5.4: Jalan Pemukiman yang Rusak di Desa Seberang Taluk Hilir.....	79



UIN SUSKA RIAU

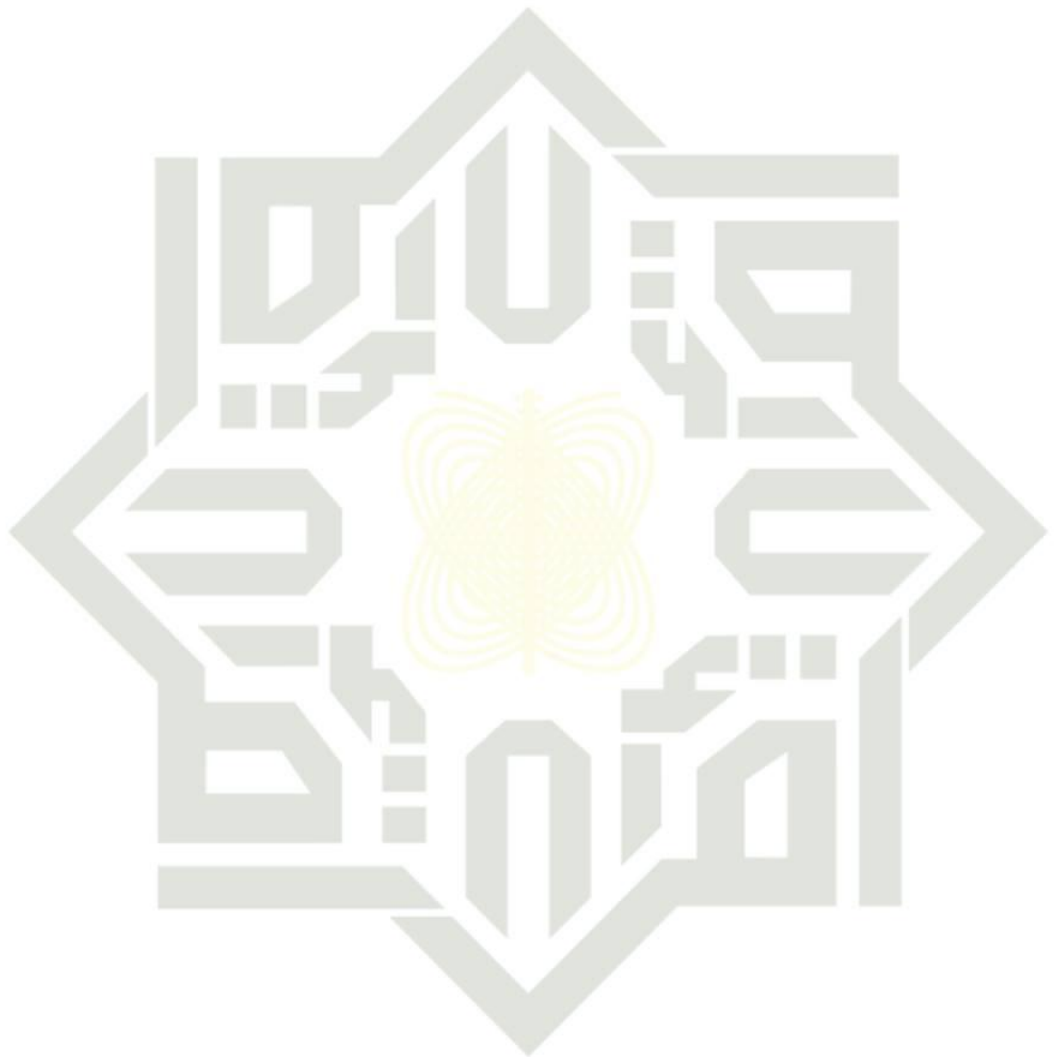


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Seberang Taluk Hilir	94
---	----



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan biasanya bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu negara untuk mencapai tujuan negara menuju sebuah modernitas.

Di negara berkembang secara umum banyak tertinggal dari berbagai aspek bila dibandingkan dengan negara maju. Sehingga perlu adanya gerakan pembangunan di negara berkembang untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Begitu juga halnya dengan Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini mengencakan pelaksanaan pembangunan baik dipusat ataupun di daerah. Hal ini dikarenakan indonesia yang tergolong negara berkembang yang masih terdapat banyak daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas umum yang memadai. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat lapisan.

Mengingat banyaknya jumlah provinsi, kabupaten, serta desa di Indonesia. Maka akan terkesan sulit jika pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Sehingga diperlukan adanya gerakan pembangunan dari pemerintahan terbawah yaitu desa untuk ikut andil dalam melakukan pembangunan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2018 jumlah desa di Indonesia mencapai 82.000 desa, data ini dikeluarkan oleh Kantor Pusat BPS (Badan Pusat Statistik) pada 19 April 2018. Dengan besarnya jumlah desa tersebut, hadirnya otonomi desa adalah salah satu bentuk pemberian hak otonom kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan begitu desa akan lebih mudah dalam merancang pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa serta dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang positif terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutkan dalam nama lain, sebelumnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari undang-undang diatas dapat terlihat bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, begitu juga dengan urusan pembangunan di desa tersebut.

Kewenangan desa untuk mengatur pembangunannya sendiri juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 18 yang menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya, pada pasal 78 disebutkan pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya pada masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir sebagaimana salah satu bentuk perwujudan dari otonomi desa yang melimpahkan sebagian wewenang dari pusat kepada pemerintahan desa. Dengan adanya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir, sehingga bisa mengurangi masalah-masalah pengangguran dan mata pencaharian, kesejahteraan sosial, pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Desa Seberang Taluk Hilir merupakan bagian administratif di Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Kuantan Tengah ini terdiri dari 23 desa/kelurahan dan Desa Seberang Taluk Hilir termasuk salah satu diantaranya..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Seberang Taluk Hilir merupakan wilayah yang letaknya paling strategis karena berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang sedang berkembang pesat pembangunannya. Walaupun berada di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan daerah, Desa Seberang Taluk Hilir masih tergolong dalam desa tertinggal. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pembangunan di desa serta faktor sosial ekonomi lainnya yang menyebabkan Desa Seberang Taluk Hilir masih tergolong ke dalam desa tertinggal. Salah satu faktor penyebab Desa Seberang Taluk Hilir masih tergolong dalam desa tertinggal adalah tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah. Berikut adalah data pendidikan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir:

Tabel 1.1: Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat 2018

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	163 orang
2.	SLTP/MTs	52 orang
3.	SLTA/MA	48 orang
4.	SI/Diploma	62 orang
5.	Putus Sekolah	118 orang
6.	Buta Huruf	- orang
Total		443 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan kemampuan di bidang lain yang dimiliki masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir memilih untuk berkebun atau bertani untuk menjadi mata pencaharian tetap bagi mereka. Adapun data mata pencaharian masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2: Struktur Mata Pencaharian Masyarakat 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	577 orang
2.	PNS	47 orang
3.	Honorar	28 orang
4.	Karyawan Swata	77 orang
5.	Ibu Rumah Tangga	138 orang
6.	TNI	1 orang
7.	Polri	2 orang
8.	Pesiunan	6 orang
9.	Pengangguran	25 orang
Total		901 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir berprofesi sebagai petani, yaitu sebanyak 577 orang. Rendahnya tingkat pendidikan serta kemampuan dibidang lainyang terbatas menyebabkan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir memilih berkebun atau bertani menjadi mata pencaharian mereka.

Dari rendahnya tingkat pendidikan yang rendah serta sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir masih tergolong dalam masyarakat tradisional dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang tergolong masih rendah.

Dari dua permasalahan diatas, Desa Seberang Taluk Hilir juga memiliki permasalahan sosial ekonomi lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa yang tergambar dalam daftar masalah desa. Berikut adalah daftar masalah Desa Seberang Taluk Hilir:

Tabel 1.3: Daftar Masalah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2018

No.	Masalah Desa
1.	Ada Banyaknya Jalan Tanah
2.	Tidak ada Honor Guru Surau Tiga Dusun
3.	Anak balita belum mendapatkan pendidikan PAUD dan TK
4.	Jalan desa sering terjadi karena pembangunan siring & gorong-gorong serta jembatan & tanggul penahan air belum ada
5.	Lahan perkebunan & perikanan masih banyak belum dimanfaatkan
6.	Masih banyak rumah yang belum layak huni
7.	Saluran drainase di desa belum cukup memadai
8.	Jembatan banyak yang rusak dan masih banyak jalan yang perlu jembatan
9.	Jalan di lingkungan banyak yang tak ada gorong-gorong
10.	Stadion belum selaesai dan belum ada bench pemain cadangan
11.	Tanah Pemakaman belum dipagar dan belum ada gapura
12.	TK/PAUD/KB/SPS/TPA belum mencukupi biaya operasionalnya
13.	Desa belum ada tugu batas desa dengan desa tetangga
14.	Desa belum ada pos ronda permanen di setiap dusun
15.	Desa belum mempunyai gedung serba guna untuk kegiatan olah raga dan kegiatan seni
16.	Jalan menuju ke Kebun masyarakat masih banyak yang tidak bagus

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Seberang Taluk Hilir 2018-2023

Dari tabel di atas, dapat tergambar sebagian besar permasalahan yang terjadi di Desa Seberang Taluk Hilir adalah mengenai permasalahan insfrastuktur desa, baik itu berupa infrastruktur jalan, jembatan, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Seberang Taluk Hilir Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2023, membuat prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 sebagian besar bidang yang harus diselesaikan adalah mengenai bidang pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa tahun 2018. Adapun program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 Desa Seberang Taluk Hilir meliputi:

Tabel 1.4: Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018

No.	Bidang	Jenis kegiatan
1.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	a. Pembukaan/pembangunan jalan baru usaha tani; b. Pembangunan semenisasi jalan pemukiman; c. Pembangunan jembatan; d. Pembangunan pintu air; e. Pemeliharaan bendungan; f. Pembangunan pagar kebun; g. Pembangunan pagar pemukiman; h. Pembuatan gorong-gorong; i. Pengaspalan jalan; j. Pembangunan turap penahan tanah; k. Pembangunan drainase;
2.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	a. Pembangunan MCK; b. Pembangunan/pemeliharaan Sumur Bor; c. Pengadaan Peralatan Kesehatan POSKESDES;
3.	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	a. Alat Pertanian; b. Pembibitan Tanaman Pangan;

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Seberang Taluk Hilir 2018-2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar rencana pembangunan tahun 2018 berprioritas pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan. Dari 16 (enam belas) program kegiatan pembangunan diatas, Desa Seberang Taluk Hilir membuat 8 (delapan) rancangan pembangunan desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Seberang Taluk Hilir tahun 2018. Adapun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1: Rencana Kerja Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2018

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu pelaksanaan	Pembiayaan		Keterangan
						Jumlah (Rp)	Sumber	
1.	Kegiatan penneisasi jalan pemukiman	Desa	321 m	Peningkatan Transformasi Masyarakat	2018	175.076.600	APBDES	Terlaksana
2.	Pembangunan / pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	1.215 m	Peningkatan Transformasi Masyarakat	2018	287.460.600	APBDES	Terlaksana
3.	Kegiatan pembukaan Jalan Baru dan Turap	Desa	1.195 m	Peningkatan Transformasi Masyarakat	2018	128.509.405	APBDES	Tidak Terlaksana
4.	Pembangunan jembatan	Desa	45 m	Peningkatan Transformasi Masyarakat	2018	129.179.800	APBDES	Terlaksana
5.	Kegiatan pengadaan Bibit Pinang Bataran	Desa	257 Btg	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2018	57.599.900	APBDES	Terlaksana
6.	Pengadaan alat pertanian	Desa	2 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2018	29.500.000	APBDES	Terlaksana
7.	Pengadaan Empat Perbibitan Tanaman	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2018	59.905.900	APBDES	Terlaksana
8.	Pengadaan peralatan kesehatan emegensi	Desa	8 Unit	Pelayanan Kesehatan	2018	8.245.900	APBDES	Terlaksana

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar fokus pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir adalah pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan, jembatan, serta sarana kesehatan. Gencarnya pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan, disebabkan karena jalan menjadi sarana utama bagi masyarakat desa untuk beraktivitas belum memadai. Dengan adanya sarana jalan dan jembatan yang baik, maka diharapkan akan berdampak baik pula bagi masyarakat dalam kemudahan seperti melakukan mobilitas, mengangkut hasil pertanian, pemasaran hasil perikanan dll. Dengan begitu akan berdampak baik pula pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, dari data program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 dan data RKPDes tahun 2018 di atas menunjukkan masih rendahnya perealisasi pembangunan infrastruktur dari pemerintah desa. Dari 16 (enam belas) program pembangunan tahun 2018, pemerintah desa hanya membuat 8 (delapan) kegiatan pada RKPDes tahun 2018. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dari pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan desa.

Meskipun demikian, pembangunan yang sudah terealisasi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi masalah-masalah seperti kemiskinan, peningkatan pendapatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.

Selain dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur, tentu juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Di antaranya terdapat permasalahan pembebasan lahan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lahan perkebunan mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkena dampak dari pembangunan jalan tani yang dirancang oleh pemerintah desa. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi judul penelitian tentang “**Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu suatu pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah?
2. Bagaimana dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah?
3. Apa hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Untuk menganalisis dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.
3. Untuk mengetahui hambatan pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab. Dimana masing-masing bab berhubungan dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai dan mengemukakan beberapa konsep teoritis yang mendukung pemecahan masalah yang terdiri dari pengertian-pengertian yang dikutip pendapat-pendapat para ahli, hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, Informe penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV:**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik, dan demografi.

BAB V:**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah

BAB VI:**PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian bisa lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan

Pembangunan menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution (2007:27), merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksud untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Rogers menambahkan bahwa pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2005:4), pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Modernitas menurut Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2014:302), merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial. Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) dan didasarkan suatu perencanaan (*social palnning*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan menurut Haryono Sudriamunawar (2002:15), dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 56) keberhasilan pembangunan pada masyarakat Desa dapat dilihat dari :

- a. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
- b. Waktu pelaksanaanya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.
- c. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan akan berdampak baik bagi masyarakat desa, baik dari segi ekonomi dan sosial masyarakat desa. Adapun tujuan dari Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 ayat (1) adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang kesinambungan dan terencana tentu memerlukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa, Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

2.1.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebut bahwa Perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam rencana pembangunan desa terdapat yang namanya RPJM Desa. RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun juga mencapai tujuan dan cita-cita desa kedepannya. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka Indonesia akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pelaksanaan operasional dijabarkan dalam bentuk RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa dalam membuat suatu rencana pembangunan berdasarkan:

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan berupa material.

Berpihak pada masyarakat, maksudnya adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di desa.

Terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah desa, pembangunan fisik desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- f Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
- f Selektif, semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- f Efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- i. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik.
- k. Penggalan informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.
- f Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan RKPDDes agar tidak melenceng dan memiliki panduan pembangunan yang jelas dan terencana. Selain itu pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 81.

2.1.3 Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa sangat diperlukan untuk melihat gerak dari organisasi apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam proses pembangunan masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan kepada Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa. Selain itu, Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 82.

2.1.4 Infrastruktur Desa

Definisi infrastruktur menurut Stone (dalam Kodoatie,2003), Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pendestriaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem *social* dan *system* ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu :

Jalan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).
- b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.
- c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/ gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antar satuan pemukiman atau jalan masuk ke masing-masing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan.

2) Air bersih

Kebutuhan air bersih di wilayah pedesaan menggunakan pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan dan keuntungan antara lain:

- a. Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu.
- b. Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil.
- c. Sistem sambung pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap.
- d. Sistem operasional secara sederhana dan murah.
- e. Kebutuhan tenaga tidak besar.

Listrik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4) Rumah

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat. sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat, baik membangun sendiri ataupun menyewa dari pihak lain.

Kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat desa pada umumnya keterjangkauan pembiayaan perumahan.

5) Irigasi

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil pertanian masyarakat, terutama hasil pertanian berupa padi. Pentingnya keberadaan irigasi di desa disebabkan karena sebagian sumber mata pencaharian masyarakat desa adalah petani.

2.2 Konsep Otonomi Desa

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi desa. Menurut H.A.W Widjaja (2005:165), Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut H.A.W Widjaja (2011:22) tujuan dari otonomi sendiri adalah untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keluasaan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa) sebagai otonomi asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan berikut:

1. Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi dan sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
- Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dijelaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

4 Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5 Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.2.1 Pemerintahan Desa

Ani Sri Rahayu (2018:180) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam Ani Sri Rahayu (2018:180) mengatakan, pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Bidang Penanaman Modal;
- Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bidang Kesehatan;
- Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bidang sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bidang Penataan Ruang;
12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
13. Bidang Pekerjaan Umum;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
17. Bidang Otonomi Desa;
18. Bidang Perimbangan Keuangan;
19. Bidang Tugas Pembantuan;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Pertanahan;
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
24. Bidang perencanaan;
25. Bidang Penerangan/ Informasi dan Komunikasi;
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
28. Bidang Pemuda dan Olahraga;
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desaa;
30. Bidang Statistik; dan
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:1), desa adalah satuan pemerintahan yang memberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Jadi, desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa di wilaya kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 9, menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
4. Memeberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
9. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

2.2.2 Sumber Dana Pembangunan Desa

Pembangunan desa bersumber dari pendapatan desa. Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil usaha desa. Contoh: desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- 2) Hasil kekayaan desa. Contoh: tanah kas desa, pasar desa, wisata yang dikelola desa, dan lain sebagainya.
- 3) Hasil swadaya desa dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contoh: iuran penitipan kendaraan.
- 4) Lain-lain pendapatan hasil desa. Contoh: sewa tanah desa.

b. Transfer

- 1) Dana desa adalah sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Contoh: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.
- 4) Bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota

Kelompok pendapatan lain-lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milki desa sesuai Undang-Undang, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dari pendapatan desa yang diperoleh, kemudian desa mempergunakannya untuk belanja desa. Belanja desa menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Salah satu bentuk belanja desa adalah pelaksanaan pembangunan desa. Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contohnya pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya.

Dana desa merupakan salah satu Pendapatan Desa, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pendapatan yang bersumber pada transfer. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Dana Desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Dana Desa merupakan transfer dana langsung anggaran belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara pemindah hukum dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas umum Daerah (RKUD), lalu Kabupaten/Kota menyalurkan Dana Desa tersebut kepada desa dengan cara pemindah hukum dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa.

Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat secara nasional dalam APBN setiap tahun harus dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah bahwa implikasi lebih lanjut pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah selanjutnya kepada pemerintah desa sebagai otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, prioritas penggunaan anggaran, dengan harapan agar terciptanya kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Adapun prinsip penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam Salinan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa, APBDes dikelola oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan peran Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas Belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa mengalokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- d. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.3 Dampak Sosial

Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang dampak sosial dan ekonomi. Perubahan sosial merupakan gambaran umum dari perubahan-perubahan yang terjadi di luar perencanaan maupun kesengajaan. Selain itu perubahan sosial juga dipandang sebagai sebuah cerminan perubahan dari karakter masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Bryan S.Turner (2012: 421), mengatakan perubahan sosial mencerminkan berbagai ketidakpastian yang mau tak mau diperkuat oleh perubahan sosial yang terjadi dan masalah-masalah yang menyertai berbagai perubahan dan pergeseran yang terjadi pada institusi dan pola-pola kehidupan sehari-hari yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat.

Elly M Setiadi (2006: 51) mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan telah didukung oleh sebagian anggota masyarakat merupakan tuntutan dari kehidupan dalam mencari kestabilan.

Menurut Zamroni dalam Esti Ismawati (2012: 15) menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat berdasarkan pada tujuh asumsi, yakni:

Masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh terdiri atas berbagai bagian yang saling berinteraksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis dimana penyesuaian tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
4. Integrasi yang sempurna pada masyarakat tidak pernah ada oleh karena itu masyarakat akan senantiasa akan timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Namun dengan demikian ketegangan dan penyimpang ini akan dinetralisir lewat proses kelembagaan.
5. Perubahan akan berjalan secara perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian dari luar tumbuh karena ada diferensi dan inovasi.
6. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

Soerjono Soekanto dalam Elly Setiadi (2006: 55) menyebutkan ada dua faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yaitu :

Faktor intern

- a. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat;
- b. Adanya penemuan-penemuan baru meliputi berbagai proses seperti, penemuan unsur kebudayaan baru (*discovery*), pengembangan (*invention*) dari penemuan unsur kebudayaan baru tersebut dan proses pembaharuan (*innovation*);
- c. Konflik dalam masyarakat yang dimaksud adalah konflik antar individu dalam masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

2. Faktor ekstern

- a. Faktor alam yang ada disekitar masyarakat yang berubah-ubah;
- b. Pengaruh kebudayaan lain seperti kontak antar budaya yang berbeda;
- c. Kebijakan yang tertentu dikeluarkan oleh pemerintah.

Umumnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk (Vina Dwi Laning, 2008 : 16-20), yaitu :

1. Perubahan Evolusi dan Revolusi

Perubahan evolusi merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan evolusi berlangsung mengikuti perkembangan masyarakat yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan kata lain perubahan sosial evolusi terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Sebaliknya perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat mengenai sandi-sandi pokok kehidupan masyarakat (lembaga-lembaga masyarakat). Perubahan revolusi dapat terjadi karena direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Perubahan revolusi biasanya diawali oleh ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Agar suatu perubahan revolusi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



a. Harus ada keinginan umum untuk melakukan suatu perubahan. Dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan yang ada.

b. Adanya seseorang atau sekelompok orang dalam menggerakkan yang mampu memimpin masyarakat tersebut.

c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan untuk kemudian dirumuskan menjadi sebuah tuntutan revolusi, serta berani mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat.

d. Pemimpin tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai arah bertindak, tujuan tersebut harus bersifat kongkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan tujuan yang bersifat abstrak seperti sebuah ideologi baru.

e. Terdapat waktu yang tepat melakukan revolusi. Penentuan waktu yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan suatu revolusi.

Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah direncanakan atau diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan. Pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*. *Agent of change* yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga masyarakat. Perubahan yang direncanakan oleh masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Dalam kondisi ini masyarakat akan serta merta menerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan yang dilakukan oleh para *agent of change* yang dirasa sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang berlangsung diluar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berkembangnya kualitas dan kuantitas anggota masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial. Selain interaksi, juga diperlukan modernisasi masyarakat, yang mana modernisasi adalah suatu proses transformasi yang akan menimbulkan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat.

2.4 Dampak Ekonomi

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Secara sederhana dampak adalah sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif.

Perubahan ekonomi merupakan proses berubahnya sistem yang terjadi di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi masyarakat kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat. Menurut Tri Haryanto (2007: 24), adapun faktor-faktor penghambat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah.
2. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi.
3. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa penunjang yang lemah.
4. Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lemah.
5. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah.
6. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif yang rendah.
7. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat pedesaan masih terbatas dan belum merata.

Johara T. Jayadinata dan Pramandika (2006: 16), mengatakan perlu dibangunnya perekonomian yang baik bukanlah sekedar suatu pemihakan kepada rakyat tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut

Pemanfaatan potensi daerah secara optimal baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

tersebut. Namun Tri Haryanto (2007: 54), menegaskan daerah akan mengalami kemunduran atau perkembangan yang lambat apabila tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Begitu juga hal nya dengan desa, jika desa tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berupa lahan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dengan baik, maka akan mengalami kemunduran.

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 11), masyarakat desa hidup dalam ekonomi subsistem, yaitu sistem ekonomi dimana komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang mereka kembangkan dan hasilkan sendiri yang umumnya berasal dari sawah, perkebunan, ladang, hutan, sungai, danau, tambak dan laut.

Apabila masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik, maka perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat pun akan baik pula. Hal ini tentu didukung dengan adanya infrastruktur yang menunjang mobilitas khususnya masyarakat desa untuk memasarkan hasil pertaniannya tentunya memberikan manfaat seperti meningkatnya hasil pertanian para petani serta sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pula pada perubahan sosial lainnya seperti tingkat pendidikan.

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak yang positif bagi sosial ekonomi masyarakat. Beragam usahapun dilakukan oleh pemerintah dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Disamping itu kurangnya kemampuan aparat desa dalam melaksanakan pembangunan menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu. Islam memaparkan konsep pembangunan yang seimbang agar jangan melakukan kerusakan di bumi. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

إِنَّهُمْ أَلَا مَصْلِحُونَ، نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضُ فِي تَفْسِدُوا لَا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا
يَشْعُرُونَ لَا وَلَكِنَّ الْمُفْسِدُونَ هُمْ

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”(QS al-Baqarah:11-12).*

Dari penjelasan dan Firman Allah SWT diatas dapat jabarkan bahwa akibat dari keingkaran, keserakahan dan mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini, akan menyebabkan terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi yang diakibatkan karena ulah manusia sendiri.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Akhmarudin dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Di desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun”. Penelitian ini dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan yang didapat dari hasil skripsi tersebut bahwa Analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis hasilnya Tidak Baik. Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan di desa ini tidak bisa berjalan secara optimal. Akibat dari pelaksanaan pembangunan ini tidak baik maka otonomi di desa ini semakin lama semakin hilang. Salah satu contoh, pembangunan dibidang kenyamanan Desa. Karena tidak adanya penjagaan kusus di desa ini, maka anak-anak muda berlaku semena-mena, banyak kemaksiatan yang terjadi. Budaya-budaya dari adat-istiadat mereka sendiri semakin lama semakin hilang.

2. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Mustika Nastri, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara”. Penelitian ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Hasanuddin Makassar. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah secara umum pembangunan di Lembang Bangkelekila’ sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lembang Bangkelekila’ masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami.
 - a. Dalam tahap perencanaan, pemerintah Lembang Bangkelekila’ memfokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi darat masyarakat. Hal itu sudah sesuai dengan prioritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, meski belum maksimal namun terlihat partisipasi masyarakat sudah cukup baik dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah mulai dari musyawarah dusun, musyawarah Lembang hingga Musyawarah perencanaan pembangunan Lembang.

- b. Pada tahun anggaran 2016 pembangunan yang terlaksana hanya 4 program yang dikondisikan dengan dana yang tersedia. Dalam tahap ini pelaksanaan partisipasi masyarakat masih kurang, yang ikut berpartisipasi hanya sebagian masyarakat yang digaji untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah Desa tidak transparansi dalam penggunaan dana selama pembangunan, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk berbuat curang.
 - c. Dalam pengawasan dan pembangunan Pemerintah Daerah sudah melakukan pengawasan terhadap pemerintah Lembang Bangkelekila' namun pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas mulai dari perencanaan sampai evaluasi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yofi Syahputra dengan judul "Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Atas Keberadaan PT. RAPP Estate Baserah Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi". Penelitian ini dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan yang didapat dari hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi tersebut, bahwa dampak sosial yang ditimbulkan dari keberadaan PT. RAPP Estate Basera Cukup memberikan dampak terhadap perkembangan sosial masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir, baik dari segi keamanan, kenyamanan, kesehatan, pemukiman, fasilitas, lingkungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan dari dampak ekonomi, keberadaan PT. RAPP Estate Basera juga cukup berdampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Ini dapat disimpulkan dari kuisioner dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden bahwa terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih produktif, peningkatan pendapatan, peluang usaha baru dan peningkatan hal ini cukup memberikan perubahan meski tidak signifikan.

2.7 Definisi Konsep

Menurut Umar (2004:51), konsep merupakan sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman terhadap teori yang digunakan untuk penelitian ini, maka adapun definisi konsep yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung secara terus-menerus menuju ke arah perkembangan.
2. Otonomi desa merupakan otonomi asli yang dimiliki desa dan bukan merupakan otonomi pemberian dari pemerintah. Melalui otonomi desa, desa dapat melakukan pembangunan diberbagai bidang untuk menumbuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembangkan kemandirian daerah/ desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa tersebut.

Dampak sosial merupakan suatu akibat yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dikarenakan adanya suatu hal.

4. Dampak ekonomi adalah akibat ekonomi yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok pemerintah yang mendatangkan akibat positif atau negatif.

2.8 Konsep Operasional

Untuk kelancaran penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan konsep yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Rogers (1983)	1. Aspek Sosial a. Kesejahteraan Sosial	1) Peningkatan kesejahteraan sosial 2) Mengurangi tingkat kemiskinan 3) Kesehatan 4) Pendidikan
	b. Sarana dan Infrastruktur	1) Penyediaan alat pertanian dan sarana kesehatan 2) Jalan dan jembatan
	c. Lingkungan Sosial	1) Meminimalisir konflik 2) Hubungan baik dengan masyarakat sekitar 3) Interaksi sosial 4) Pengembangan budaya dan tradisi
	2. Aspek Ekonomi a. Lapangan Pekerjaan Baru	1) Kesempatan kerja 2) Berkurangnya pengangguran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

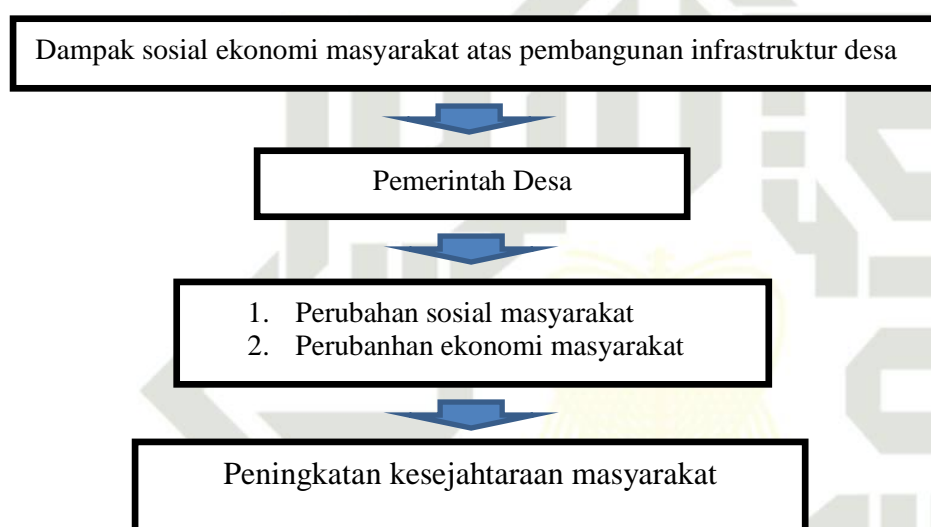
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	b. Peningkatan Pendapatan	1) Peningkatan pendapatan dari mata pencaharian sebelumnya 2) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga
--	---------------------------	---

Sumber: Rogers (1983)

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Seberang Hilir Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, karena di wilayah tersebut terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif, dimana peneliti berupaya mengungkapkan fakta apa adanya dan menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah sehingga diharapkan akan memiliki gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian deskripsi kualitatif dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data menurut Iqbal Hasan (2009:16) adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Adapun yang menjadi sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penelitian. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan menyebarkan kuisisioner kepada responden.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari instansi terkait seperti dokumen dan arsip, literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta arsip yang berkaitan dengan permasalahan dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang dimintai untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (2010:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju

untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek peneliti itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta lapangan.

Adapun subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode dengan menggunakan *Simple Random Sampling* (Sampel Acak Sederhana). Menurut teori Sugiono yaitu pengambilan sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.818}{1 + 1.818 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{1.818}{1 + 1.818 (0,01)}$$

$$n = \frac{1.818}{19,18}$$

$$= 94,7 \text{ digenapkan menjadi } 95$$

Keterangan : n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e= Error 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian karena

kesalahan pengambilan sampel).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dari hitungan populasi dari jumlah penduduk sebanyak 1.818 orang dengan kelonggaran 10%. Maka hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 94,7 yang dibulatkan menjadi 95 orang.

Selain menjadi responden dalam penelitian penulis, subjek juga sebagai pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau subjek penelitian akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Kerlinger dalam Idrus (2009:91) mendefinisikan informan sebagai orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Sedangkan menurut Basrowi dan Sukidin dalam Kuswarno (2011:63), mengatakan bahwa informan tidak lain adalah seseorang pembicara asli yang berbicara dan mengulang kata-kata, frase, dan dialek dalam bahasanya sendiri. Ia kemudian menjadi model bagi etnografer yang mempelajari bagaimana berbicara dengan bahasa asli dalam suatu kebudayaan. *Key informan* dan informasi peneliti yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini. Kemudian adapun informasi penelitian yang melengkapi informasi tentang situasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa	1 orang
2.	Sekretaris desa	1 orang
3.	Bendahara desa	1 orang
4.	Tokoh Masyarakat (RW)	1 orang
5.	Masyarakat	5 orang
	Jumlah	9 orang

Sumber: Data Olahan 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan dalam pemecahan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab langsung kepada responden, dimana peneliti membuat garis-garis besar dan kerangka pokok yang ditanyakan selama wawancara. Disini peneliti akan bertanya secara mendalam mengenai masalah terkait dengan para informan. Wawancara ini dilakukan secara luwes dan tidak formal agar memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Untuk mendukung keperluan penganalisaan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi. Menurut Riduwan (2004:104) observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode ini adalah penunjang dalam melakukan penelitian.

c. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data, dokumen-dokumen guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber. Adapun datanya yakni berupa arsip-arsip, tabel-tabel dan bahan dokumentasi lainnya yang dibutuhkan untuk sumber penelitian ini.

d. Kuesioner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuesioner menurut Arikunto (2002) adalah jumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kelebihan menggunakan kuesioner adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan kelemahan kuesioner adalah angket bersifat kaku karena pertanyaan yang telah ditentukan dan responden tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar membaca kemudian memberi jawaban.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Ardhanan dalam Lexy J. Meleong (2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Analisa data merupakan langkah untuk mengolah data yang telah didapat menjadi sebuah data, dimana data diperoleh, diolah serta dimanfaatkan guna menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif melalui penelitian secara langsung di lapangan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Fukuensi yang sedang dicari hasilnya

N = Number of Cases (Jumlah Fukuensi atau banyaknya individu)

100% = Bilangan Tetap

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dari dampak sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di desa seberang taluk hilir kecamatan kuantan tengah keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai pendapat Suharsimi Arikanto (2003:43) sebagai berikut :

Baik : 76-100%

Cukup Baik : 56-75%

Kurang Baik : 40-55%

Tidak Baik : 0-39%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang dampak

sosial ekonomi pembangunan infrastruktur desa di desa seberang taluk hilir kecamatan kuantan tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Seberang Taluk Hilir

Desa Seberang Teluk Hilir mulanya hasil pemekaran Dari Desa Seberang Taluk, karena perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan penduduk, maka Desa Seberang Taluk menjadi dua Desa yaitu Desa Seberang Taluk dan Desa Seberang Teluk Hilir, sejak tahun 2003 Desa ini bernama Desa Persiapan Seberang Teluk Hilir, berdasarkan musyawarah desa Persiapan Seberang Taluk Hilir ditunjuklah Pjs. Kepala Desa yaitu Bapak ASHMIRZA H. AZIZ seiring dengan waktu dan perjuangan yang begitu panjang dan rumit pada sangat itu tepatnya pada tanggal 21 Desember 2010 Desa Persiapan Seberang Teluk Hilir di resmikan Oleh Bupati Kuantan Singingi Bapak H. SUKARMIS menjadi Desa Definitif Seberang Teluk Hilir, sehingga pada saat ini seiring dengan perubahan waktu para pengemban tampuk pemerintahan selalu berganti, yang mana pergantian ini dirasakan oleh desa dari masa kemasa sehingga perubahan demi perubahan terjadi di desa ini. Diantara nya tokoh atau Kepala desa masa kemasa Desa Seberang Taluk Hilir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ASHMIRZA H. AZIZ | (Pjs.Kepala Desa Periode 2003 s/d 2010); |
| 2. SUKARDI | (Kepala Desa Periode 2010 s/d 2016); |
| 3. ELPI SATRIADI | (Pjs.Kepala Desa Periode 2016 s/d 2017); |
| 4. SOLAHUDIN, SE | (Kepala Desa Periode 2018 s/d Sekarang). |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Umum Desa

Kondisi umum Desa Seberang Taluk Hilir dapat tergambarkan dari geografis dan jumlah penduduk sebagai berikut:

a. Geografis

1. Letak dan luas wilayah

Desa Seberang Taluk Hilir merupakan salah satu dari 23 desa dan 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, yang terletak 3 Km ke arah Barat dari Kota Kecamatan.

2. Iklim

Iklim Desa Seberang Taluk Hilir sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Tropis, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.

b. Jumlah Penduduk

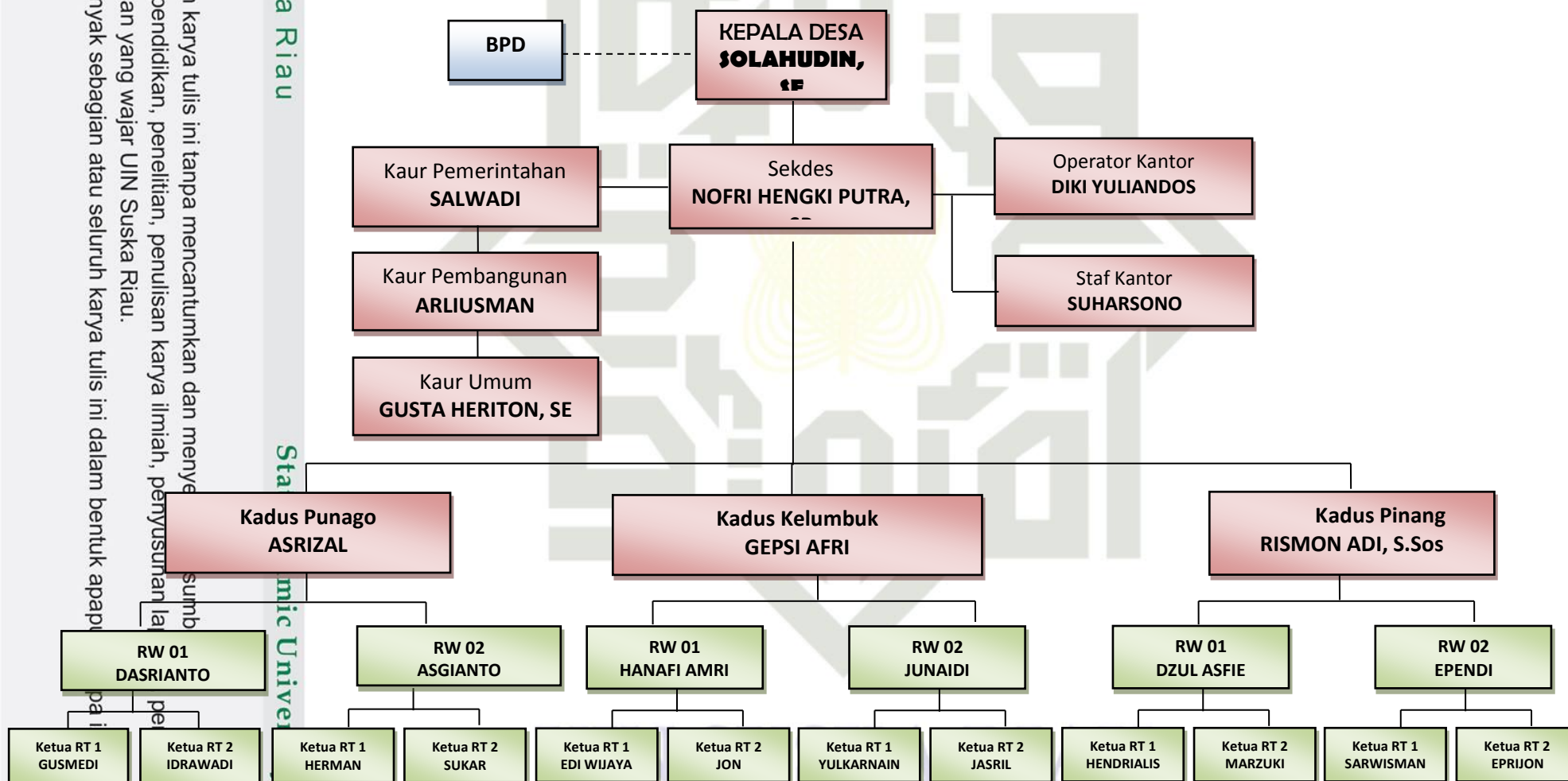
Desa Seberang Taluk Hilir mempunyai jumlah penduduk 1.818 Jiwa dari 445 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 3 (Tiga) Dusun, 6 (enam) RW dan 12 (Dua Belas) RT.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah menganut system kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya akan disajikan dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Demografi Desa

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Desa Seberang Taluk Hilir, desa ini berbatasan dengan empat wilayah desa lain, berikut adalah batas-batas Desa Seberang Taluk Hilir:

Tabel 4.1: Batas Desa Seberang Taluk Hilir

No.	Arah	Batas Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Pulau Komang Sentajo, Sungai Kuantan
2.	Sebelah Selatan	Desa Cengar, Pantai Lubuk Ramo, PT. Duta Palma
3.	Sebelah Barat	Desa seberang Taluk
4.	Sebelah Timur	Desa Pulau Baru Kopah

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2018

Wilayah Desa Seberang Taluk Hilir sebagian besarnya terdiri dari pemukiman, wilayah pertanian, serta hutan yang masih cukup luas. Adapun luas wilayah Desa Seberang Taluk Hilir dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.2: Luas Wilayah Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017

No.	Wilayah	Luas
1.	Pemukiman	100 ha
2.	Pertanian Sawah	140 ha
3.	Ladang/tegalan	50 ha
4.	Hutan	120 ha
5.	Rawa-rawa	40 ha
6.	Perkantoran	0,25 ha
7.	Sekolah	6 ha
8.	Jalan	45 ha
9.	Lapangan sepak bola	2 ha
Total		503,25 ha

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2018

4.5 Kondisi Penduduk

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal yang efektif bagi pembangunan nasional

Salah satu penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang sangat pesat akan sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Desa Seberang Taluk Hilir terdiri dari 445 KK dari 1.800 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk Desa Seberang Taluk Hilir berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Desa Seberang Taluk Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	931 Orang
2.	Perempuan	887 Orang
Total		1.818 Orang

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2018

4.6 Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat suatu bangsa. Di Desa Seberang Taluk Hilir terdapat sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berikut data pendidikan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir:

Tabel 4.4: Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/ MI	150 Orang
2.	SLTP/ MTs	47 Orang
3.	SLTA/ MA	40 Orang
4.	S1/ Diploma	60 Orang
5.	Putus Sekolah	80 Orang
6.	Buta Huruf	- Orang
Total		377 Orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat dalam suatu daerah maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat tersebut. Dari tabel-tabel dibawah dapat dilihat bagaimana tingkat kesehatan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir sebagai berikut:

Tabel 4.5: Jumlah Tingkat Kematian Bayi Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Bayi lahir pada tahun ini	15 orang
2.	Bayi meninggal tahun ini	- orang
Total		15 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

Tabel 4.6: Jumlah Tingkat Kematian Ibu Melahirkan Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Ibu melahirkan tahun ini	15 orang
2.	Ibu melahirkan meninggal tahun ini	- orang
Total		15 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

Tabel 4.7: Jumlah Cakupan Imunisasi Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017

No.	Jenis Imunisasi	Jumlah
1.	Imunisasi Polio 3	7 orang
2.	Imunisasi DPT-1	6 orang
3.	Imunisasi Cacar	8 orang
Total		21 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8: Jumlah Pemenuhan Air Bersih Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2017

No.	Jenis Air Bersih	Jumlah
1.	Pengguna sumur galian	310 KK
2.	Pengguna air PAM	- KK
3.	Pengguna sumur pompa	- KK
4.	Pengguna air sungai	60 KK
Total		370 KK

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

4.8 Keagamaan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai suatu masyarakat yang heterogen, kehidupan beragama tentulah merupakan suatu keadaan yang dapat dilihat pada masyarakat indonesia, begitu juga dengan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir yang dapat di lihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.9: Data Keagamaan Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2015

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1547 orang
2.	Katolik	- orang
3.	Kristen	271 orang
4.	Hindu	- orang
5.	Budha	- orang
Total		1.818 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

4.9 Mata Pencaharian Masyarakat

Mata Pencaharian masyarakat merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut dengan memberdayakan potensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumber daya alam yang terdapat di tersebut wilayah, begitu juga dengan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir yang data mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.10: Struktur Mata Pencaharian Masyarakat Tahun 2018

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	600 orang
2.	PNS	41 orang
3.	Guru	16 orang
4.	Honorar	28 orang
5.	Karyawan Swata	77 orang
6.	Ibu Rumah Tangga	138 orang
7.	TNI	1 orang
8.	Polri	2 orang
9.	Pesiunan	15 orang
10.	Pengangguran	31 orang
Total		949 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Seberang Taluk Hilir 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana pembangunan infrastruktur Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah dalam memberikan dampak terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah. Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden bahwa dari aspek sosial dan ekonomi pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak **“Cukup Baik”** bagi masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir dengan nilai rata-rata 69,49%.

Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan melihat masih kurang maksimalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Seberang Taluk Hilir dalam memberikan dampak perkembangan sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini terlihat dari dampak sosial dengan adanya permasalahan pembebasan lahan yang terjadi antar pemerintah desa dengan masyarakat sehingga menyebabkan proyek pembangunan jalan terhambat dan tidak dapat dilanjutkan, selain itu hubungan antara pemerintah desa dengan beberapa masyarakat desa menjadi kurang harmonis.

Dari indikator sarana dan infrastruktur peneliti melihat masih kurang teratannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan hanya memfokuskan pembangunan kearah pertanian saja, sehingga menyebabkan

infrastruktur lain seperti jalan pemukiman yang rusak dan berlobang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Hal ini menyebabkan hanya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sajalah yang merasakan dampak dari pembangunan.

Saran

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka disini peneliti akan memberikan saran kepada Pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir, diharapkan kedepannya akan lebih baik mewujudkan kesejahteraan bersama. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih melibatkan masyarakat dan berdiskusi dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat meminimalisir konflik yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari.
 2. Diharapkan kepada pemerintah desa agar lebih melakukan pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut.
- Diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat lebih memperhatikan sumber daya manusianya terutama bidang pendidikan, hal mengingat masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir tergolong dalam masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga berdampak pula terhadap Perekonomian masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

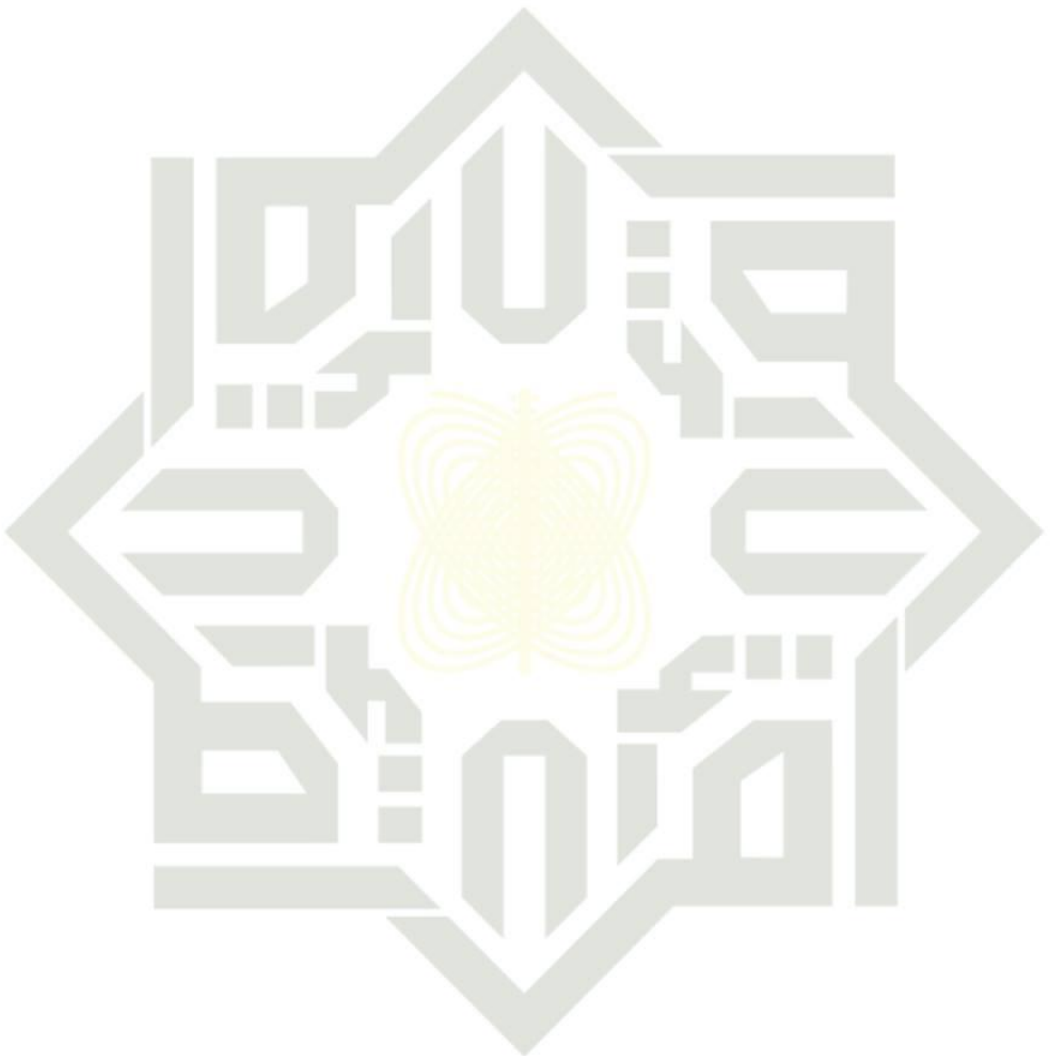
4. Diharapkan kepada masyarakat desa untuk mengawasi jalannya program pembangunan dan program penunjang ekonomi lainnya seperti pembagian bantuan bibit tanaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya Dan Swakelola*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Hasan, Iqbal. 2009. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1(Statistik Dskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara.
- Ismawati, Esti. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuswarno, Engkus. 2011. *Etnografi Komunikasi: Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrstruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laning, Dwi Vina. 2008. *Perubahan Sosial Masyarakat Masa Reformasi*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Melong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Reneka cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranjabar, Jacobus. 2008. *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro Pendekatan Realitas Sosial*. Jakarta: CV Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Setiadi, Elly M, Dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sondang, Siagian P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.

Sadriamunawar, Haryono. 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

T Johara, Jayadinata dan I.G.P. Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

_____. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang dan peraturan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahj Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian (Skripsi):

Akhmarudin. 2013. *“Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penahar Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun”*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Suska Riau. Kota Pekanbaru.

Nastri, Mustika. 2017. *“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanudin Makassar.

Syahputra, Yofi. 2016. *“Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Atas Keberadaan PT. RAPP Estate Baserah Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Suska Riau. Kota Pekanbaru.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : _____

Bekerjaan/Jab :

Alamat :

Aspek Sosial

A. Kesejahteraan Sosial

1. Bagaimana kebijakan pembangunan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Seberang Taluk Hilir?
2. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur desa terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di desa Seerang Taluk Hilir?
3. Bagaimana kebijakan pembangunan dari pemerintahan desa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat?
4. Bagaimana peran dari pemerintah desa untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat desa?

B. Sarana dan Infrastruktur

1. Bagaimana penyediaan alat pertanian dan sarana kesehatan oleh pemerintah desa?
2. Bagaimana penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh pemerintah desa?

C. Lingkungan Sosial

1. Bagaimana peran dari pemerintah desa dan kotoh masyarakat dalam meminimalisir konflik yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana dampak dari pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir?
3. Bagaimana hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur?
4. Bagaimana upaya dari pemerintah desa dalam pengembangan budaya dan tradisi melalui pembangunan infrastruktur?

II. Aspek Ekonomi

A. Lapangan Pekerjaan Baru

1. Bagaimana peran dari pemerintah desa dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran?

B. Peningkatan Pendapatan

1. Bagaimana upaya dari pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan pendapatan dari mata pencaharian sebelumnya?
2. Bagaimana peran dari pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR

Identitas Responden

Inisial :
 Umur :
 Jenis Kelamin : L / P
 Pekerjaan :
 Pendidikan :

Petunjuk Pengisian:

- 1) Berilah tanda (X) pada kolom yang sesuai dengan apa yang anda rasakan.
- 2) Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 pilihan jawaban yaitu:
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - TS = Tidak Setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju

I. Aspek Sosial

A. Kesejahteraan Sosial

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat desa.				
2	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa.				
3	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kesehatan masyarakat desa.				
4	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa memberikan pengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat desa.				

B. Sarana dan Infrastruktur

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Penyediaan alat pertanian dan sarana kesehatan telah sesuai dengan harapan masyarakat desa.				
2	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa.				

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lingkungan Sosial

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Konflik di desa menurun dengan adanya pembangunan infrastruktur desa.				
2	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa berdampak baik bagi hubungan antar masyarakat desa.				
3	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa selalu melibatkan masyarakat desa.				
4	Pembangunan infrastruktur desa selalu mendukung pengembangan budaya dan tradisi.				

D. Aspek Ekonomi

A. Lapangan Pekerjaan Baru

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat desa.				
2	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak pada berkurangnya jumlah pengangguran.				

B. Peningkatan Pendapatan

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak pada meningkatnya pendapatan mata pencaharian masyarakat desa dari sebelumnya.				
2	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat desa semakin meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat.				



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Un.04/F.VII/PP.00.9/1294/2019
Biasa
-
Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Drs. H. Almasri, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mia Febriza Ramadhanti
NIM : 11575204392
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: " Analisis Dampak
Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Seberang
Taluk Kecamatan Kuantan Tengah ". Sehubungan dengan itu kami
menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi
mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Un.04/F.VII/PP.00.9/1294/2019

Biasa

-

Bimbingan Skripsi

Kepada



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Un.04/F.VII/PP.00.9/1294/2019
Biasa
-
Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Drs. H. Almasri, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mia Febriza Ramadhanti
NIM : 11575204392
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: " Analisis Dampak
Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Seberang
Taluk Kecamatan Kuantan Tengah ". Sehubungan dengan itu kami
menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi
mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Un.04/F.VII/PP.00.9/1294/2019

Biasa

-

Bimbingan Skripsi

Kepada

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/1294/2019

: Biasa

: -

: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 07 Februari 2019 M

1 Jumadil Akhir 1440 H

Kepada

Yth. Drs. H. Almasri, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mia Febriza Ramadhanti

NIM : 11575204392

Jurusan : Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: " Analisis Dampak
Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Seberang
Taluk Kecamatan Kuantan Tengah ". Sehubungan dengan itu kami
menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi
mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2129/2019
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 13 Maret 2019 M
6 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mia Febriza Ramadhanti
NIM: : 11575204392
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa
Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Ha
ngi Undang-Undang
grip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
an hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/20193
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.VII/PP-00.9/2129/2019 Tanggal 13 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

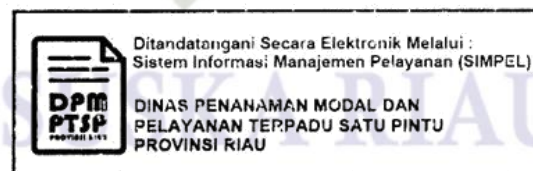
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MIA FEBRIZA RAMADHANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 1157204392 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR KECAMATAN KUANTAN TENGAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA SEBERANG TALUK HILIR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Maret 2019



Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpstptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmpstptk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPTSP-PTSP/2019/116

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/20193 Tanggal 18 MARET 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MIA FEBRIZA RAMADHANTI
NIM : 1157204392
Jurusan : ADMINISTRASI NEGAPA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR KEC KUANTAN TENGAH"

Untuk melakukan Penelitian di : KANTOR DESA SEBERANG TALUK HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

Drs. LINSKAR
Pembina Utama Muda
NIP 19650717 199203 1 007



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA SEBERANG TALUK HILIR**

Alamat Kantor : Jln. Raya Seberang Taluk Hilir No. Email: desa.sbth@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Nomor : 108/SBTH/III/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini mengatakan bahwa :

Nama	: MIA FEBRIZA RAMADHANTI
Tempat/Tgl Lahir	: Seberang Taluk, 08 Februari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fak	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Punago RT 002 / RW 001 Desa Seberang Taluk Hilir

Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 071/DPMPTSPTK-PTSP/2019/116 tanggal 18 Maret 2019 dan yang bersangkutan diatas benar telah melakukan kegiatan Pra Riset/Riset dan mengumpulkan data untuk skripsi yang berjudul " **ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SEBERANG TALUK HILIR KECAMATAN KUANTAN TENGAH** " Sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019 Dokantor Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Seberang Taluk Hilir
Pada tanggal : 29 Maret 2019

KEPALA DESA SEBERANG TALUK HILIR



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Mia Febriza Ramadhanti, Lahir di Seberang Taluk 08 Februari 1996. Merupakan anak pertama dari dua (2) bersaudara. Ayah bernama Gusmedi dan ibu bernama Kotdija. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 004 Seberang Taluk Hilir. Pada tahun 2011 Penulis menyelesaikan Pendidikan di SMP Negeri 5 Teluk Kuantan, dan pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Dan pada tahun yang 2015 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SBMPTN, dan penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2018 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Badan Pendapatan Provinsi Riau dan di tahun yang sama Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

Berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 27 September 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah.”**